

PENGARUH PENGAWASAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGGARAN

Putri Aulia Salsa Billa¹, Evada Dewata², Yuli Antina Aryani³
putriauliasb09@gmail.com¹, evada78@polsri.ac.id², yuli_aa@polsri.ac.id³
Politeknik Negeri Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional, dan sistem pengendalian intern pemerintah di Bapenda Kota Palembang. Jenis penelitian data ialah penelitian kuantitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Koefisien determinasi atau nilai adjusted R^2 sebesar 0,860 atau 86% variasi efektivitas pengendalian anggaran dapat dijelaskan oleh ketempat variabel independen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

Kata Kunci: Pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern pemerintah, dan efektivitas pengendalian anggaran.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of preventive supervision, supervisory supervision, functional supervision, and the government's internal control system at Bapenda Palembang City. This type of data research is quantitative research, with data collection methods using a questionnaire survey. This study uses multiple linear regression analysis with SPSS version 26. The results of this study partially and simultaneously indicate that preventive supervision, supervisory supervision, functional supervision, and the government's internal control system have a positive and significant effect on pressure control weaknesses. The coefficient of determination or adjusted R^2 value is 0.860, which means that 86% of the budget for preventive supervision, supervisory supervision, functional supervision, SPIP and the rest is influenced by other variables outside the independent variables used.

Keywords: Preventive supervision, supervisory detective, functional supervision, government internal control system, and the effectiveness of budget control.

PENDAHULUAN

Pencapaian suatu negara merupakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan program pemerintah bisa berjalan dengan baik disebabkan adanya pengendalian yang disusun dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di Indonesia, pembagian pemerintahan ada 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran keduanya saling berhubungan dimana pemerintah pusat melakukan program kegiatannya secara terpusat sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus kegiatan dan permasalahan pemerintahannya sendiri, kewenangan itu disebut otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah dalam wujud hak dan wewenang mengatur serta mengurus kegiatan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya pada negara dan bangsa, serta masyarakat dan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan. Komponen yang penting dalam

pelaksanaan otonomi daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi yaitu anggaran. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai program dan kegiatan suatu organisasi yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter atau uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dalam penyusunannya membutuhkan data serta informasi untuk dijadikan bahan taksiran (Oktarina, 2019). Pada tahun 2018 tingkat efektivitas penyerapan anggaran bapenda kota Palembang sebesar 96,30% dengan capaian efektif, tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 63,31%, tahun 2020 sedikit bertambah menjadi 66,21%, tahun 2021 naik lagi menjadi 77,41%, dan di tahun 2022 semakin bertambah menjadi 108,55% dengan capaian sangat efektif. Setelah dirata-ratakan dari 5 tahun terakhir, ternyata tingkat efektivitasnya hanya sebesar 70,92% yang artinya masih kurang efektif. Tentunya untuk mendapatkan realisasi anggaran yang maksimal harus diikuti dengan perencanaan dan pengawasan anggaran yang baik.

Pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya (Nurfaidah, 2019). Dengan adanya pengawasan, maka akan mendapatkan informasi terkait keuangan kegiatan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut digunakan sesuai pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 9 Tahun 1998 terkait : "Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui sosialisasi keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara".

Pengawasan adalah bagian dari pengendalian, pelaksanaan pengawasan tidak selalu sesuai dengan yang ditetapkan tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Dampak dari kurangnya pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran yang tidak optimal. Maka dari itu diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mendukung kekurangan pengawasan.

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan atau program pemerintah maka bisa diukur dari efektifitas pengendalian anggaran tersebut. Efektivitas adalah suatu ukuran hasil tugas atau keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Pengelolaan anggaran dikatakan efektif saat fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern tidak terjadi permasalahan dan penyelewengan dalam laporan keuangannya (Beni, 2016). Fenomena yang menjadi dasar penelitian adalah adanya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran di Badan pendapatan daerah Kota Palembang yang masih terjadi permasalahan. Salah satunya adalah kepala Bapenda kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan pajak pada OPD, tidak optimal dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan teknis administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta adanya beberapa kesalahan lain (Supriyanto, 2022). Kelemahan dalam penerapan pengawasan dan sistem pengendalian intern dapat saja mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan dana, penyimpangan dalam administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan atau ketidakefektifan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran, yaitu pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional, dan sistem pengendalian intern pemerintah.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses untuk menemukan hubungan antar variabel yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang hendak diketahui.

Populasi dalam penelitian ini adalah 208 pegawai Bapenda Kota Palembang, sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengendalian anggaran yang terbagi dalam 5 bidang. Sampel penelitian dijelaskan dalam tabel 1 berikut ini :

No	Bidang	Responden
1	Pengendalian & Basis Data Pajak Daerah	7 Orang
2	PBB & BPHTB	7 Orang
3	Pajak Daerah Lainnya	9 Orang
4	Penagihan , Perencanaan & Pembinaan Pajak Daerah	7 Orang
5	Sekretariat	20 Orang
	Jumlah	50 Orang

Sumber : Bapenda Kota Palembang, 2023

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Data diperoleh dari responden yang dikumpulkan melalui daftar pernyataan atau kuesioner terstruktur yang telah disediakan. Dari 50 kuesioner yang dibagikan ke Bapenda Kota Palembang, kuesioner yang kembali berjumlah 46 kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.050	6.036		-1.334	.186
	KSA_TOTAL	.505	.098	.418	5.170	.000
	KAPD_TOTAL	.300	.112	.203	2.675	.009
	SP_TOTAL	.547	.095	.465	5.749	.000

a. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 2 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AKIP = -8,050 + 0,505X_1 + 0,300X_2 + 0,547X_3$$

Keterangan:

AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

X₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)

X₂ : Kompetensi Aparatur Pemerintah
Daerah (KAPD)

X₃ : Sistem Pelaporan (SP)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian R² dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 ^a	.558	.541	2.73445

a. Predictors: (Constant), SP_TOTAL, KAPD_TOTAL, KSA_TOTAL

b. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0,541 yang artinya adalah 54,1% variabel AKIP dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan. Sedangkan sisanya sebesar 45,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Berdasarkan pada tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 5,170 > 1,991 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H₁ diterima.

Variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,675 > 1,991 dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H₂ diterima.

Variabel sistem pelaporan memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 5,749 > 1,991 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H₃ diterima.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Hasil pengujian dari uji statistic F dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	727.811	3	242.604	32.446	.000 ^b
	Residual	575.744	77	7.477		
	Total	1303.556	80			

a. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

b. Predictors: (Constant), SP_TOTAL, KAPD_TOTAL, KSA_TOTAL

Sumber: Output SPSS, 2023

Tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H₄ diterima.

Pembahasan**Pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap AKIP**

Pada tabel 2, thitung variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai sebesar 5,170. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusannya, dimana nilai thitung > ttabel, dalam hal ini 5,170 > 1,991 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP diterima.

Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, dimana meningkatnya kejelasan sasaran anggaran akan berpengaruh terhadap meningkatnya AKIP. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan oleh tiap instansi pemerintah, maka akan semakin baik pula AKIP. Sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran buruk, maka AKIP juga akan berdampak buruk. Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Wahid (2016) dan Andriani & Wati (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap AKIP

Hasil uji statistik t yang terlihat pada tabel 2 menunjukkan nilai thitung untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar 2,675. Dimana jika nilai thitung > ttabel, dalam hal ini $2,675 > 1,991$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP diterima. Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, dimana meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah akan berdampak pada meningkatnya AKIP. Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan tiap organisasi, oleh sebab itu dibutuhkan pengelolaan yang baik agar aparatur pemerintah dapat berkualitas dan memberikan kontribusi yang maksimal. Hasil ini selaras dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Wahid (2016) dan Safitri (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap AKIP.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap AKIP

Hasil uji statistik t yang terlihat pada tabel 2 menunjukkan nilai thitung untuk variabel sistem pelaporan sebesar 5,794. Yang mana apabila nilai thitung > ttabel dalam hal ini $5,794 > 1,991$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP diterima.

Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, tentunya peningkatan sistem pelaporan akan berdampak pula pada meningkatnya AKIP. Sistem pelaporan yang baik akan berbanding lurus dengan akuntabilitas kinerja, karena sistem pelaporan yang baik adalah jika laporan tersebut disusun secara jujur, tidak memihak pada suatu hal, terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu Anastasia (2018) dan Rahman & Yusuf (2021) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap AKIP.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP

Berdasarkan tabel 4 yang menunjukkan hasil uji statistik F, dimana nilai Fhitung sebesar 32,446. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusannya, apabila nilai Fhitung > Ftabel dalam hal ini $32,446 > 27,24$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap AKIP diterima. Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, dimana meningkatnya kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan akan mempengaruhi meningkatnya AKIP. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Wahid (2016) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan terhadap AKIP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang jelas dan spesifik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi tiap aparatur pemerintah tentunya akan semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik juga.
4. Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewah Yogyakarta). Kompak, 13: 37-67.
- Anastasia, D. R. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). Doctoral Dissertation. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Andriani, G. A. A., & Wati, N. W. A. E. 2021. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Hita Akuntansi dan Keuangan, 2 (4): 418-436.
- Anjarawati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Accounting Analysis Journal: 1-7.
- Bastian, Indra. 2009. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Faizal, Y. A., & Yaya, R. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Naskah Publikasi: 1-18.
- Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD Di Provinsi Riau). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 4(1): 670-685.
- Hafiz, Muhammad. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 4(1): 5280542.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Herawaty, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora.

- Irawati, A., & Agesta, C. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Auntansi dan Keuangan*, 10(1): 56-70.
- Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2016. *Pengantar Manajemen*. Bogor: CV. In Media.
- Nurkholis & Khosaini, M.. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Pratama, Rio., dkk. 2019. Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Explorasi Akuntansi*. 1(1) seri d.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahman, A., & Yusuf, M. 2021. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Rosmarie, Dinny. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat). *Doctoral Dissertation*. Universitas Komputer Indonesia.
- Wahid, Imam. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1).
- Yulianto, Rudi, Ahmad & Osmad Muthafer. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 14, No. 2..